

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. Menerapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BPBD mempunyai fungsi :**

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 kepada Bupati selaku Kepala Daerah, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang perhitungan kas pelaksanaan dari semua yang dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yaitu kelompok pendapatan belanja yang memuat ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan penyajian informasi lainnya yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

#### **1.4.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Badan
  - 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.4 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan;
- II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.1 Kebijakan Keuangan;
  - 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Akuntansi;
  - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan denganketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
    - 4.4.1.Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
    - 4.4.2.Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
    - 4.4.3.Kebijakan Akuntansi Belanja.
    - 4.4.4.Kebijakan Akuntansi Beban.
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
    - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

- 5.1.2 Belanja Modal
- 5.2 Neraca
  - 5.2.1 Aset
  - 5.2.2 Kewajiban.
- 5.3 Laporan Operasional;
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VII. Penutup.

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2020 meliputi hal berikut :

##### 2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan.

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah.

##### 2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

#### 2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian

DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat menetapkan 10 program yang didukung oleh 31 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

| No | Kegiatan   | Anggaran           | Realisasi          | %      |
|----|--|--------------------|--------------------|--------|
|    |  | Rp.                | Rp.                |        |
| 1  | Penyediaan jasa surat menyurat                       | 3.495.000          | 3.495.000          | 100,00 |
| 2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan      | 41.400.000         | 31.055.006         | 75,01  |
| 3  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                | 537.458.000        | 529.939.000        | 98,60  |
| 4  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                    | 23.515.000         | 23.176.300         | 98,56  |
| 5  | Penyediaan ATK                                       | 25.441.484         | 25.441.000         | 100,00 |
| 6  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan            | 11.460.000         | 8.907.200          | 77,72  |
| 7  | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan   | 13.497.000         | 13.490.000         | 99,95  |
| 8  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor         | 34.723.000         | 34.720.000         | 99,99  |
| 9  | Penyediaan makanan dan minuman                       | 9.100.000          | 4.874.900          | 53,57  |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 116.355.000        | 116.182.685        | 99,85  |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>816.444.484</b> | <b>791.281.091</b> | 96,92  |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

| No | Kegiatan   | Anggaran          | Realisasi         | %       |
|----|--|-------------------|-------------------|---------|
|    |  | Rp.               | Rp.               |         |
| 1  | Pengadaan mebeluer                                     | -                 | -                 | #DIV/0! |
| 2  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 66.713.946        | 58.883.000        | 88,26   |
| 3  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 3.100.000         | 2.290.000         | 73,87   |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>69.813.946</b> | <b>61.173.000</b> | 87,62   |

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

|   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---------|
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - | - | #DIV/0! |
|   | <b>Jumlah</b>                                   | - | - | #DIV/0! |
|   |   |   |   |         |

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

| No | Kegiatan                        | Anggaran | Realisasi | %       |
|----|---------------------------------|----------|-----------|---------|
|    |                                 | Rp.      | Rp.       |         |
| 1  | Pendidikan dan pelatihan formal | -        | -         | #DIV/0! |
|    | <b>Jumlah</b>                   | -        | -         | #DIV/0! |

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

| No | Kegiatan   | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|----|--|-------------------|-------------------|-------|
|    |  | Rp.               | Rp.               |       |
| 1  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 31.897.000        | 27.390.600        | 85,87 |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>31.897.000</b> | <b>27.390.600</b> | 85,87 |

6. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.

| No | Kegiatan                           | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|    |                                    | Rp.               | Rp.               |       |
| 1. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 17.477.000        | 17.415.000        | 99,65 |
|    | <b>Jumlah</b>                      | <b>17.477.000</b> | <b>17.415.000</b> | 99,65 |

7. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana.

| No | Kegiatan   | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|----|--|-------------------|-------------------|-------|
|    |  | Rp.               | Rp.               |       |
| 1  | Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana                             | 32.568.000        | 32.403.450        | 99,49 |
| 2  | Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana | 12.590.259        | 12.555.960        | 99,73 |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>45.158.259</b> | <b>44.959.410</b> | 99,56 |

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan.

| No | Kegiatan   | Anggaran | Realisasi | %       |
|----|--|----------|-----------|---------|
|    |  | Rp.      | Rp.       |         |
| 1  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi | -        | -         | #DIV/0! |
|    | <b>Jumlah</b>  | -        | -         | #DIV/0! |

9. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial

| No | Kegiatan                           | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|    |                                    | Rp.               | Rp.               |       |
| 1  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 11.085.000        | 11.030.000        | 99,50 |
|    | <b>Jumlah</b>                      | <b>11.085.000</b> | <b>11.030.000</b> | 99,50 |

## 10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

| No | Kegiatan   | Anggaran           | Realisasi          | %            |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|
|    |  | Rp.                | Rp.                |              |
| 1  | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam                     | 17.913.000         | 15.047.000         | 84,00        |
| 2  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana    | 33.400.000         | 33.400.000         | 100,00       |
| 3  | Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara | 2.652.500          | 2.650.000          | 99,91        |
| 4  | Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana              | 156.711.000        | 132.238.967        | 84,38        |
| 5  | Pengadaan Perlengkapan SAR   | 6.636.400          | 6.631.285          | 99,92        |
| 6  | Piket Pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi                                   | 100.020.000        | 94.800.000         | 94,78        |
| 7  | Sosialisasi tentang Bencana Alam   | 13.571.800         | 13.410.026         | 98,81        |
| 8  | Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana                    | 15.732.700         | 15.335.756         | 97,48        |
| 9  | Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan   | 31.380.000         | 31.350.000         | 99,90        |
| 10 | Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalop PB                             | 27.060.000         | 19.740.000         | 72,95        |
| 11 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana        | 94.043.000         | 90.788.243         | 96,54        |
| 12 | Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan Bencana                           | 14.672.400         | 14.578.200         | 99,36        |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>513.792.800</b> | <b>469.969.477</b> | <b>91,47</b> |
|    |  |                    |                    |              |
|    |  |                    |                    |              |

Ke-10 (sepuluh) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar  $\pm 94,53\%$ .

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pencapaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

**3.1.1. Belanja**

Total realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.169.685.447,- Jumlah tersebut mencapai 96,75% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.4.309.803.855,- dengan rincian sebagai berikut :

| <b>Belanja Operasi</b>                |                      |                      |              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Pegawai                       | 2.913.518.366        | 2.850.041.312        | 97,82        |
| Belanja Barang Dan Jasa               | 1.351.562.489        | 1.274.924.135        | 94,33        |
| Belanja Modal                         | 44.723.000           | 44.720.000           | 99,99        |
| - Belanja Peralatan Mesin             | 44.723.000           | 44.720.000           | 99,99        |
| - Belanja Gedung Dan Bangunan         | -                    | -                    | #DIV/0!      |
| - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | -                    | -                    | #DIV/0!      |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>4.309.803.855</b> | <b>4.169.685.447</b> | <b>96,75</b> |
|                                       |                      |                      |              |
|                                       |                      |                      |              |
|                                       |                      |                      |              |

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.913.518.366,- terealisasi sebesar Rp.2.850.041.312,- atau sebesar 97,82%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.63.477.054,-

Pada belanja Barang Dan Jasa yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 1.351.562.489,- terealisasi sebesar Rp. 1.274.924.135,- atau sebesar 94,33%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 76.638.354,-

Sedangkan untuk belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 44.723.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.720.000,- atau sebesar 99,99%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 3.000,-

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2020 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan basis akuntansi aktual :

### 4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2011 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Badan Keuangan Daerah .

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disyahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis aktual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **4.3 Basis Pengurangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

##### **1. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar rupiah.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **2. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

### **3. Investasi Jangka Pendek.**

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya yang didalamnya mencakup harga inventasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
- b. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

### **4. Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

### **5. Investasi Jangka Panjang.**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost)

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyetaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kembali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanan lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizzable value)

### **6. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup hargapembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga taksiran pada saat perolehan.

#### **7. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

#### **8. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

#### **9. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya –biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan.

#### **10. Aset Tetap Lainnya.**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap lainnya.

#### **11. Kontruksi Dalam Pengerjaan.**

Kontruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Kontruksi dalam pengerjaan tersebut. Biaya kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan diukur berdasarkan uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

##### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA.**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat

- Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja.**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban.**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat ;

1. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya : Tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

2. Terjadinya konsumsi aset.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

| No.   | Perkiraan       | Realisasi 2020<br>( Rp ) | Realisasi 2019<br>( Rp ) |
|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 5     | Belanja.        |                          |                          |
| 5.1   | Belanja Operasi |                          |                          |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2020<br>2.844.134.312,-  | 2019<br>2.744.809.932,-  |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi Belanja pegawai tersebut terinci atas :

| Uraian  | Realisasi 2020       | Realisasi 2019       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Belanja Pegawai</b>                              | <b>2.844.134.312</b> | <b>2.810.196.682</b> |
| <b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>                   | <b>2.146.143.661</b> | <b>2.065.148.108</b> |
| Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                   | 1.391.333.000        | 1.289.878.880        |
| Tunjangan Keluarga                                  | 158.984.269          | 147.699.444          |
| Tunjangan Jabatan                                   | 130.725.000          | 119.140.000          |
| Tunjangan Fungsional Umum                           | 39.360.000           | 39.375.000           |
| Tunjangan Beras                                     | 93.132.120           | 88.207.560           |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                      | 1.791.229            | 1.401.222            |
| Iuran Jamiman Kesehatan/BPJS Kesehatan              | 32.988.184           | -                    |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian | 18.038.601           | 12.415.362           |
| Gaji Ketiga Belas                                   | 144.040.358          | 184.000.336          |
| Tunjangan Hari Raya                                 | 135.750.900          | 183.030.304          |
| <b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>             | <b>697.990.651</b>   | <b>679.662.124</b>   |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja        | 371.649.387          | 381.809.316          |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja      | 326.341.264          | 297.852.808          |
| <b>Uang Lembur</b>                                  | <b>3.590.700,00</b>  | <b>65.386.450,00</b> |
| Uang Lembur PNS                                     | -                    | 46.361.450,00        |

|                                      |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | <b>2020</b>            | <b>2019</b>            |
| <b>5.1.2 Belanja Barang Dan Jasa</b> | <b>1.049.172.135,-</b> | <b>2.407.566.955,-</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Barang Dan Jasa dalam Tahun Anggaran 2020 Dan 2019. Jumlah realisasi mencapai 93,73 % dari anggaran yang ditetapkan .

Rincian Belanja Barang dan Jasa terinci sebagai berikut :

| Uraian   | Realisasi 2020       | Realisasi 2019       |
|--|----------------------|----------------------|
| Belanja Barang dan Jasa  | <b>1.049.172.135</b> | <b>2.407.566.955</b> |
| Belanja Alat Tulis Kantor  | 25.441.000           | 62.300.000           |
| Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) | 1.430.000            | 9.000.000            |
| Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya                                    | 3.495.000            | 5.100.000            |
| Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                                   | 1.516.300            | 3.031.000            |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas   | 31.852.776           | 20.425.613           |
| Belanja penguburan dan Pemulangan klien  | 4.000.000            |                      |
| Belanja alat tulis / seminar kit peserta   | -                    | -                    |
| Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang Negara                      | -                    | -                    |
| Belanja kelengkapan kerja lapangan   | 23.400.000           | 103.008.638          |
| Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)                       | -                    | -                    |
| Belanja telepon  | 2.751.848            | 4.995.620            |
| Belanja listrik  | 20.883.158           | 19.575.792           |
| Belanja surat kabar/majalah  | 7.420.000            | 7.895.000            |
| Belanja kawat/faksimili/internet   | -                    | -                    |
| Belanja Jasa Pengganti Transportasi  | 33.900.000           | -                    |
| Belanja Jasa Kebersihan Kantor   | 21.660.000           | 21.600.000           |
| Dst....  |                      |                      |
| Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas  | 346.974.000          | 266.040.000          |
| Belanja Jasa Piket Malam   | 80.640.000           | 380.280.000          |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber                                       | -                    | -                    |
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan   | -                    | -                    |
| Belanja Jasa Service   | 13.607.000           | 25.064.465           |
| Belanja Penggantian Suku Cadang  | 44.894.500           | 77.674.302           |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas   | 68.587.917           | 120.231.134          |
| Belanja Pajak Kendaraan Bermotor   | 11.487.450           | 8.655.350            |
| Belanja cetak  | 1.400.000            | 10.710.000           |
| Belanja Penggandaan  | 8.907.200            | 30.406.800           |
| Belanja Penjilidan (Non cetak cover)   | -                    | 500.000              |
| Belanja Publikasi  | -                    | 9.800.000            |
| Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir   | -                    | -                    |
| Belanja sewa ruang rapat/pertemuan   | -                    | -                    |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Belanja makanan dan minuman harian pegawai                                 | -           | 5.570.000   |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat  | 3.100.000   | 17.482.000  |
| Belanja Makanan Dan Minuman Tamu   | 1.774.900   | 9.994.100   |
| Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan                                      | -           | 4.675.000   |
| Belanja Pakaian Dinas dan atributnya                                       |             |             |
| Belanja Pakaian Kerja Lapangan   | -           | 87.912.000  |
| Belanja Pakaian Kerja  | -           | -           |
| Belanja Pakaian Dinas Harian   | -           | -           |
| Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu                              | -           | -           |
| Belanja Pakaian Peserta  | 30.000.000  | -           |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah                                      | 32.845.000  | 95.350.000  |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah                                       | 209.944.086 | 597.218.184 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                   | -           | -           |
| Belanja Pemeliharaan Atap/Loteng   | -           | -           |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 4.950.000   | 13.030.000  |
| Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi                                     | -           | 278.511.500 |
| Belanja Kursus-Kursus singkat/pelatihan                                    | -           | 54.918.000  |
| Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/ Tugu/ Monumen                      | -           | 970.000     |
| Belanja Pemeliharaan Mesin Kerja Lapangan                                  | 250.000     | 1.965.000   |
| Moderator  | -           | -           |
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                                      | -           | -           |
| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                                   | -           | -           |
| Honorarium Panitia Pemeriksa Barang  | -           | -           |
| Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran                   | -           | -           |
| Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK | -           | -           |
| Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK      | -           | -           |
| Honorarium Bendahara, Pembantu bendahara dan Bendahara Pembantu            | -           | -           |
| Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                                     | -           | -           |
| Honorarium MC / Pembawa Acara  | -           | -           |
| Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an                                 | -           | -           |

**5.1.3 Belanja Modal**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>2020</b>         | <b>2019</b>          |
| <b>44.720.000,-</b> | <b>414.253.277,-</b> |

Dana Belanja Modal berasal dari DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020, terealisasi sebesar Rp. 44.720.000,- dari total Anggaran sebesar Rp.44.723.000,- atau 99,99 % dari anggaran yang ditetapkan.

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b> | <b>44.720.000,-</b> | <b>211.932.727,-</b> |
|--|---------------------|----------------------|

Jumlah tersebut merupakan belanja Modal Peralatan dan Mesin ini Tahun 2020 dan 2019. Untuk tahun 2020 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 99,99 % dari jumlah yang dianggarkan Rp. 44.723.000,-.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2020 dan Tahun 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

| No        | Uraian  | Realisasi 2020    | Realisasi 2019     |
|-----------|---|-------------------|--------------------|
| <b>A.</b> | <b>Jumlah Belanja Modal</b>                         | <b>44.720.000</b> | <b>211.932.727</b> |
| 1         | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 11.723.000        | 11.723.000         |
| 2         | Belanja modal Pengadaan komputer note book          | 22.997.000        | 22.997.000         |
| 3         | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan ukur     | 10.000.000        | 10.000.000         |
| 4         | Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan         | -                 | 108.922.727        |

Atas Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp. 44.720.000,- dikelompokan sebagai berikut :

- Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer Rp. 11.723.000 ,-
- Belanja Modal Pengadaan computer Rp. 22.997.000 ,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan ukur Rp. 10.000.000 ,-

**Belanja Modal Peralatan dan Mesin Covid-19 134.700.000,-**

Jumlah tersebut merupakan belanja Modal Peralatan dan Mesin Covid ini Tahun 2020 . Untuk tahun 2020 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 97,12 % dari jumlah yang dianggarkan Rp. 138.700.000,-.

dapat dirinci sebagai berikut :

| No        | Uraian  | Realisasi 2020     | Realisasi 2019 |
|-----------|---|--------------------|----------------|
| <b>A.</b> | <b>Jumlah Belanja Modal</b>                                     | <b>134.700.000</b> | <b>-</b>       |
| 1         | Belanja modal Pengadaan TV untuk Video Confren Posko Pemantauan | 10.000.000         | -              |
| 2         | Belanja modal Pengadaan komputer note book (covid)              | 31.000.000         | -              |
| 3         | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin                             | 24.000.000         | -              |
| 4         | Belanja Modal Pengadaan AC Standing                             | 24.000.000         | -              |
| 5         | Belanja Modal Pengadaan Tedmon                                  | 1.900.000          | -              |
| 6         | Belanja Modal Pengadaan Speaker Sirine                          | 3.000.000          | -              |
| 7         | Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara Mobil Unit               | 5.000.000          | -              |
| 8         | Belanja Modal Pengadaan Corong Speaker Whelen Sirine            | 1.200.000          | -              |
| 9         | Belanja Modal Pengadaan IC Whelen HHS 200 Watt                  | 5.600.000          | -              |
| 10        | Belanja Modal Pengadaan Wireles Sistem Rapat                    | 6.000.000          | -              |
| 11        | Belanja Modal Pengadaan Catridge dan Tinta Printer Office Jet   | 6.000.000          | -              |
| 12        | Belanja Modal Pengadaan Toner Printer                           | 3.000.000          | -              |
| 13        | Belanja Modal Pengadaan Disk Internal                           | 6.000.000          | -              |
| 14        | Belanja Modal Pengadaan Printer                                 | 8.000.000          | -              |

Atas Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Covid Tahun 2020 sebesar Rp.134.700.000,- dikelompokan sebagai berikut :

- Belanja modal Pengadaan TV untuk Video Confren Posko Pemantauan Rp. 10.000.000,-



## 1.1.2 Persediaan

2020  
3.775.000,-2019  
6.023.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Persediaan yang ada pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** per 31 Desember 2020 dan 2019, saldo persediaan yang terdiri dari :

| No | Uraian                | 2020        | 2019      |
|----|-----------------------|-------------|-----------|
| 1  | Kertas Folio F4       | 1.000.000,- | 294.000,- |
| 2  | Map BPBD              | 272.000,-   | 900.000,- |
| 3  | Map Lucky             | 102.000,-   | -         |
| 4  | Map Box File          | -           | 90.000,-  |
| 5  | Cetak Kwitansi        | 270.000,-   | -         |
| 6  | Kwitansi              | -           | 210.000,- |
| 7  | Pena Mygel            | -           | 60.000,-  |
| 8  | Kertas A4             | 420.000,-   | 105.000,- |
| 9  | Amplop Surat          | -           | 180.000,- |
| 10 | Amplop BPBD           | -           | 100.000,- |
| 11 | Opner                 | -           | 170.000,- |
| 12 | Amplop Besar          | 40.000,-    | -         |
| 13 | Pelobang Kertas Besar | 120.000,-   | -         |
| 14 | Stabilo               | 20.000,-    | 8.000     |
| 15 | Spidol                | -           | 22.000,-  |
| 16 | Gunting               | 60.000,-    | -         |
| 17 | Trigonal              | 6.000,-     | -         |
| 18 | Buku Folio            | 100.000,-   | -         |
| 19 | Binder Klip 260       | -           | 19.000,-  |
| 20 | Clip Diagonal         | -           | -         |
| 21 | Pena boldiner         | 300.000,-   | 125.000,- |
| 22 | Lampu 40 Wat          | 380.000,-   | -         |
| 23 | Lampu 30 Wat          | 340.000,-   | -         |
| 24 | Kabel Raun            | 100.000,-   | -         |
| 25 | Kabel                 | 120.000,-   | -         |
| 26 | Colokan               | 10.000,-    | -         |

|    |                           |                    |                    |
|----|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 27 | Terminal                  | 25.000,-           |                    |
| 28 | Tang                      | 75.000,-           |                    |
| 29 | Tespen                    | 15.000,-           |                    |
| 30 | Anak Hekter               | -                  | 40.000,-           |
| 31 | Pembelian Tedmon 1000 Ltr | -                  | 3.700.000,-        |
|    | <b>Jumlah</b>             | <b>3.775.000,-</b> | <b>6.023.000,-</b> |

**Persediaan Covid**

**2020**

**139.555.000,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Persediaan Covid-19 yang ada pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** per 31 Desember 2020, saldo persediaan yang terdiri dari :

| No | Uraian              | Jumlah       |
|----|---------------------|--------------|
| 1  | Masker KN 95        | 20.000.000,- |
| 2  | Masker Medis        | 90.750.000,- |
| 3  | Masker Kain         | 4.800.000,-  |
| 4  | Sekolah Kit         | 300.000,-    |
| 5  | Kantong Mayat       | 1.040.000,-  |
| 6  | Selimut             | 6.000.000,-  |
| 7  | Tikar               | 2.250.000,-  |
| 8  | Tipe X              | 14.000,-     |
| 9  | Map file            | 180.000,-    |
| 10 | Kertas A4           | 210.000,-    |
| 11 | Kertas F4           | 720.000,-    |
| 12 | Pena Boldiner       | 300.000,-    |
| 13 | Tinta Epson         | 500.000,-    |
| 14 | Ballpoin            | 24.000,-     |
| 15 | Binder Clip 260     | 20.000,-     |
| 16 | Map Bahari Box File | 30.000,-     |
| 17 | Amplop              | 20.000,-     |
| 18 | Tong Sampah         | 750.000,-    |

|    |                      |                      |
|----|----------------------|----------------------|
| 19 | Cangkir              | 330.000,-            |
| 20 | Sapu                 | 550.000,-            |
| 21 | Sapu Lidi            | 120.000,-            |
| 22 | Plastik Sampah Besar | 250.000,-            |
| 23 | Terminal             | 180.000,-            |
| 24 | Lampu                | 760.000,-            |
| 25 | Kabel Gulung         | 240.000,-            |
| 26 | Colokan              | 80.000,-             |
| 27 | Steker               | 120.000,-            |
| 28 | Stop Kontak          | 192.000,-            |
| 29 | Fitting Lampu        | 100.000,-            |
| 30 | Senter Emergency     | 125.000,-            |
| 31 | Lampu Emergency      | 200.000,-            |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>139.555.000,-</b> |

### 1.3 Aset Tetap.

#### 1.3.1 Tanah.

2020

2019

0

0

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah Per 31 Desember 2020 Dan 2019 tidak terdapat Aset Tanah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lima Puluh Kota.

2020

2019

#### 1.3.2 Peralatan dan Mesin

5.412.263.462,-

4.988.194.752,-

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebesar **Rp. 5.412.263.462,- dan Rp. Rp. 4.988.194.752,-.**

- Saldo Akhir 2019 4.988.194.502,-
- Mutasi Tambah
  - Belanja Modal 44.720.000,-
  - Belanja Modal Covid 134.700.000,-
  - Hibah / Mutasi Antar SKPD 87.640.800,-

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ➤ Hibah / Mutasi BPBD Provinsi | 291.574.160,-      |
| ➤ Aset Ekstracompatible 2019   | 8.555.250          |
| ➤ Belanja BJ Covid             | <u>3.000.000,-</u> |
|                                | 570.190.210,-      |

• Mutasi Kurang

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| ➤ Mutasi Kurang tidak dikapitalisir | 9.000.000,-         |
| ➤ Mutasi Kendaraan roda 4           | 46.000.000,-        |
| ➤ Hibah ke 13 Kecamatan             | 41.768.000,-        |
| ➤ Aset Ekstracompatible 2020        | <u>49.353.250,-</u> |
|                                     | 146.121.250,- -     |

5.412.263.462,-

Sehingga nilai aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020 menjadi **Rp. 5.412.263.462,-** nilai tersebut diperoleh dari jumlah nilai bersih dari Saldo Awal Aset 2020 sebesar **Rp. 4.996.749.752,-** ditambah dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar **Rp. 44.720.000,-** ditambah dengan Aset Ekstracompatible 2019 sebesar **Rp. 8.555.250,-** ditambah dengan Belanja Modal Covid-19 ( Bantuan Tidak Terduga/ PPKD ) sebesar **Rp. 134.700.000,-** ditambah dengan Hibah/ Mutasi antar SKPD sebesar **Rp. 87.640.800,-** ditambah dengan Hibah/ Mutasi BPBD Provinsi Sebesar **Rp. 291.574.160,-** Belanja Barang dan Jasa Covid sebesar **Rp.3.000.000,-** dikurangi dengan Mutasi Kurang yang tidak dikapitalisir sebesar **Rp. 9.000.000,-** dan dikurangi dengan Mutasi Kendaraan roda 4 sebesar **Rp. 46.000.000,-** dan dikurangi dengan Hibah ke 13 Kecamatan sebesar **Rp. 41.768.000,-** dan dikurangi dengan Aset Ekstracompatible s/d 2020 sebesar **Rp.49.353.250,-**

Belanja Modal sebesar **Rp. 44.700.000,-** berupa ;

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer | Rp. 11.723.000 ,- |
| - Belanja Modal Pengadaan Komputer                    | Rp. 22.997.000 ,  |
| - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan ukur     | Rp. 10.000.000 ,- |

• Aset Ekstra Kompatabel Sebesar Rp. 49.353.250,- berupa ;

| No | Nama / Jenis Barang | Tahun<br>Pembelian | Jumlah<br>Barang | Nilai Barang     |
|----|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1  | Kursi Biasa         | 2011               | 10               | Rp. 2.500.000,00 |

|              |                                 |      |    |                   |
|--------------|---------------------------------|------|----|-------------------|
| 2            | Jam Mekanis                     | 2012 | 5  | Rp. 475.000,00    |
| 3            | Dispenser                       | 2014 | 3  | Rp. 750.000,00    |
| 4            | Masker Mask                     | 2018 | 10 | Rp. 4.830.250,00  |
| 5            | Pompa Manual                    | 2020 | 33 | Rp. 14.982.000,00 |
| 6            | Pompa Elektrik                  | 2020 | 25 | Rp. 18.100.000,00 |
| 7            | Pompa Elektrik                  | 2020 | 9  | Rp. 6.516.000,00  |
| 8            | Corong Speaker Whelen<br>Sirine | 2020 | 2  | Rp. 1.200.000,00  |
| Total Jumlah |                                 |      |    | Rp. 49.353.250,00 |

¶

### 1.3.3 Gedung dan Bangunan

| 2020         | 2019         |
|--------------|--------------|
| 67.200.000,- | 67.200.000,- |

Tidak terdapat penambahan nilai aset pada Aset tetap lainnya tahun 2020 dan 2019.

### 1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

| 2020           | 2019           |
|----------------|----------------|
| 241.579.650,00 | 241.579.650,00 |

Jumlah tersebut merupakan nilai aset pada Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 dan 2019, sebesar **Rp. 241.579.650,-**, dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi penambahan :

|              |                |
|--------------|----------------|
| ▪ Saldo awal | 241.579.650,00 |
|--------------|----------------|

➤ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp. 0,-** berupa ;

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 0

Sehingga nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 menjadi **Rp. 241.579.650,-**

**1.3.5 Aset Tetap Lainnya****2020**  
**5.710.000,-****2019**  
**5.710.000,-**

Tidak terdapat penambahan nilai aset pada Aset tetap lainnya tahun 2020 dan 2019.

**1.3.7 Akm Penyusutan aset tetap****2020**  
**( 4.602.464.695,67 )****2019**  
**(4.071.746.604,50)**

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan 31 per Desember 2020 dan 2019.

**1.3.7.01 Akm penyusutan Peralatan dan Mesin**

| 1.3.7.01 | Akm.Penyusutan Peralatan Mesin | 2020                    | 2019                    |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |                                | <b>4.568.956.327,00</b> | <b>4.046.099.783,50</b> |
| 1        | Alat-Alat Berat                | 58.332.143              | 46.237.142,86           |
| 2        | Alat Angkut Apung              | 268.304.500             | 557.172.500,00          |
| 3        | Alat-Alat Angkutan             | 1.709.446.114           | 1.197.090.255,57        |
| 4        | Alat Bengkel dan Alat Ukur     | 26.100.000              | 25.750.000,00           |
| 5        | Alat Pertanian                 | 159.335.000             | 133.638.750,00          |
| 6        | Alat Kantor dan Rumah Tangga   | 1.434.528.616           | 1.275.106.070,40        |
| 7        | Alat Studio dan Komunikasi     | 392.513.750             | 339.261.000,00          |
| 8        | Alat Laboratorium              | 46.120.713              | 39.996.325,00           |
| 9        | Alat Persenjataan dan Keamanan | 471.205.700             | 431.847.739,67          |
| 10       | Alat Kedokteran                | 3.069.792               |                         |

**1.3.7.02 Akm Penyusutan Gedung Dan Bangunan**      **2020**      **2019**  
**(5.856.000,00)**      **(4.512.000,00)**

**1.3.7.03.1 Akumulasi penyusutan JIJ**      **2020**      **2019**  
**(27.652.368,67)**      **(21.134.821,00)**

## 5.2.2. KEWAJIBAN.

### I. Kewajiban Jangka Pendek

| Utang Jangka Pendek | 2020         | 2019         |
|---------------------|--------------|--------------|
|                     | 1.654.500,00 | 1.526.161,00 |

Jumlah tersebut merupakan Tagihan Listrik dan Telepon pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** bulan Desember 2020.

|                     | 2020             | 2019             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.01 Ekuitas | 1.278.902.036,00 | 1.235.434.386,50 |

Jumlah Ekuitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp. 1.278.902.036 yang merupakan nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

## 5.3 Laporan Operasional.

### 8. PENDAPATAN - LO

#### Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

|                                      | 2020          | 2019          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| •Pendapatan Hibah dari BPBD Provinsi | 289.016.000,- | -             |
| •Pendapatan Hibah                    | 289.016.000,- | 39.750.000,00 |

Jumlah tersebut merupakan pendapatan hibah pada laporan operasional tahun 2020.

|                   | 2020               | 2019                 |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 9.1 BEBAN OPERASI | Rp4.707.857.877,17 | Rp. 5.866.358.328,57 |

|                        | 2020                 | 2019                 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 9.1.1 BEBAN PEGAWAI-LO | Rp. 2.850.041.312,00 | Rp. 2.810.196.382,00 |

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 Dan 2019. Jumlah realisasi Tahun 2020 mencapai 97,82 % sedangkan Pada Tahun 2019 Jumlah Realisasi mencapai 98,83% dari anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai Pada Tahun 2020 Dan 2019 tersebut terinci atas :

|    |   |                         |                         |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| No | <b>Beban Pegawai</b>                                | <b>2.850.041.312,00</b> | <b>2.810.196.382,00</b> |
|    | <b>Beban Gaji Dan Tunjangan –LO</b>                 | <b>2.146.143.661,00</b> | <b>2.065.148.108,00</b> |
| 1  | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi –LO                | 1.391.333.000,00        | 1.289.878.880,00        |
| 2  | Tunjangan Keluarga –LO                              | 158.984.269,00          | 147.699.444,00          |
| 3  | Tunjangan Jabatan-LO                                | 130.725.000,00          | 119.140.000,00          |
| 4  | Tunjangan Fungsional Umum-LO                        | 39.360.000,00           | 39.375.000,00           |
| 5  | Tunjangan Beras-LO                                  | 93.132.120,00           | 88.207.560,00           |
| 6  | Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus –LO                  | 1.791.229,00            | 1.401.222,00            |
|    | Iuran Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kematian  | 18.038.601,00           | 12.415.362,00           |
| 7  | Gaji Ketiga Belas                                   | 144.040.358,00          | 184.000.336,00          |
| 8  | Tunjangan Hari Raya                                 | 135.750.900,00          | 183.030.304,00          |
|    | <b>Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO</b>            | <b>697.990.651,00</b>   |                         |
| 1  | Tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja- LO    | 135.750.900,00          | 381.809.316,00          |
| 2  | Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO | -                       | -                       |
| 3  | Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO   | 326.341.264,00          | 297.852.508,00          |
|    | <b>Uang Lembur-LO</b>                               | <b>65.386.450</b>       | <b>65.386.450,00</b>    |
| 1  | Uang Lembur PNS-LO                                  | -                       | 46.361.450,00           |
| 2  | Beban Uang Lembur Non PNS                           | 5.907.000,00            | 19.025.000,00           |

|                                |                      |                       |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                | <b>2020</b>          | <b>2019</b>           |
| <b>9.1.2. BEBAN PERSEDIAAN</b> | <b>89.383.076,00</b> | <b>203.721.251,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan beban persediaan dalam Tahun Anggaran 2020 Dan 2019.

Rincian beban persediaan terinci sebagai berikut :

| No | <b>BEBAN BAHAN PAKAI HABIS</b>   | <b>2020</b>          | <b>2019</b>           |
|----|--|----------------------|-----------------------|
|    |  | <b>89.383.076,00</b> | <b>203.721.251,00</b> |
| 1  | Beban Alat Tulis Kantor  | 25.054.000,00        | 61.556.000,00         |
| 2  | Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik) –LO | 365.000,00           | 9.000.000,00          |
| 3  | Beban perangk, materai dan benda pos lainnya – LO                                  | 3.495.000,00         | 5.100.000,00          |
| 4  | Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih – LO                                | 1.516.300,00         | 3.031.000,00          |

|   |   |               |                |
|---|---|---------------|----------------|
| 5 | Beban Bahan bakar minyak/gas – LO                               | 31.852.776,00 | 20.425.613,00  |
| 6 | Beban belanja alat tulis/seminar kit peserta – LO               | -             | -              |
| 7 | Belanja spanduk,bendera,marawa,umbul-umbul, Lambang Negara – LO | -             | 1.600.000,00   |
| 8 | Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO   | -             | -              |
| 9 | Beban Persediaan dari BTT tahun lalu (tedmon)                   | 3.700.000,00  | -              |
|   | <b>Beban Persediaan Bahan/Material –LO</b>                      | -             | -              |
| 1 | Beban kelengkapan kerja lapangan                                | 23.400.000,00 | 103.008.638,00 |

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          | <b>2020</b>             | <b>2019</b>             |
| <b>9.1.3. BEBAN JASA</b> | <b>1.274.924.135,00</b> | <b>1.733.394.681,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran beban Jasa dalam Tahun Anggaran 2020 dan Beban Jasa Tahun Anggaran 2019.

Rincian beban jasa terinci sebagai berikut :

| No       | BEBAN JASA                                      | 2020                    | 2019                    |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|
|          |   | <b>1.274.924.135,00</b> | <b>1.733.394.681,00</b> |
| <b>1</b> | <b>Beban Jasa Kantor</b>                        | <b>69.083.345,00</b>    | <b>42.658.073,00</b>    |
|          | - Beban Jasa Telepon                            | 2.751.848,00            | 5.149.343,00            |
|          | - Beban Jasa Listrik                            | 21.011.497,00           | 20.948.230,00           |
|          | - Beban Jasa Surat Kabar/ Majalah               | 7.420.000,00            | 7.895.000,00            |
|          | - Beban Jasa Internet                           | -                       | 8.665.500,00            |
|          | - Beban Jasa Pengganti Transportasi             | 33.900.000,00           | -                       |
|          | - Beban Jasa Kebersihan Kantor                  |                         |                         |
|          | - Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan klien | 4.000.000,00            |                         |
| <b>2</b> | <b>Beban Premi Asuransi</b>                     | -                       | <b>42.511.957,00</b>    |
| <b>3</b> | <b>Beban Kendaraan Bermotor</b>                 | <b>138.576.867,00</b>   | <b>231.625.251,00</b>   |
|          | - Beban Jasa Servis                             | 13.607.000,00           | 25.064.465,00           |
|          | - Beban Belanja Suku Cadang                     | 44.894.500,00           | 77.674.302,00           |

|           |  |                       |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
|           | - Beban Belanja Bahan Bakar Minyak                 | 68.587.917,00         | 120.231.134,00        |
|           | - Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor           | 11.487.450,00         | 8.655.350,00          |
| <b>4</b>  | <b>Beban cetak dan pengadaan</b>                   | <b>10.307.200,00</b>  | <b>51.416.000,00</b>  |
|           | - Beban Belanja Cetak                              | 1.400.000,00          | 10.710.000,00         |
|           | - Beban Belanja Pengandaan                         | 8.907.200,00          | 30.406.800,00         |
|           | - Beban Belanja Penjilidan (non Cetak Cover)       | -                     | 500.000,00            |
|           | - Beban Belanja Publikasi                          | -                     | 9.800.000,00          |
| <b>5</b>  | <b>Beban sewa rumah/gedung/gudang/parker</b>       | -                     | -                     |
| <b>7</b>  | <b>Beban makanan dan minuman</b>                   | <b>4.874.900,00</b>   | <b>37.721.100,00</b>  |
|           | - Beban Makan dan Minum Pegawai                    | -                     | 5.570.000,00          |
|           | - Beban Makan dan Minum Rapat                      | 3.100.000,00          | 17.482.000,00         |
|           | - Beban Makan dan Minum Tamu                       | 1.774.900,00          | 9.994.100,00          |
|           | - Beban Makan dan Minum Peserta/ Pelatihan         | -                     | 4.675.000,00          |
| <b>8</b>  | <b>Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu</b> | <b>30.000.000,00</b>  | -                     |
|           | - Beban Pakaian Peserta                            | 30.000.000,00         | -                     |
| <b>9</b>  | <b>Beban Pakaian Kerja</b>                         | -                     | <b>87.912.000,00</b>  |
|           | - Beban Pakaian kerja Lapangan                     | -                     | 87.912.000,00         |
| <b>10</b> | <b>Beban Pakaian Dinas dan atributnya</b>          | -                     | -                     |
| <b>11</b> | <b>Honorarium Non PNS</b>                          | <b>559.774.000,00</b> | <b>779.420.000,00</b> |
|           | - Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur               | -                     | 900.000,00            |
|           | - Beban Jasa Piket Malam                           | -                     | 380.280.000,00        |
|           | - Beban Premi Asuransi Kesehatan                   | -                     | -                     |
|           | - Beban Honorarium Pegawai Tidak Tetap             | 110.500.000,00        | 110.500.000,00        |
|           | - Beban Honorarium Moderator                       | -                     | 100.000,00            |
|           | - Beban Honorarium Pembawa Acara/ MC               | -                     | -                     |
|           | - Beban Jasa Kebersihan Kantor                     | 21.660.000,00         | 21.600.000,00         |
|           | - Beban Jasa Pegawai Harian Lepas                  | 346.974.000,00        | 266.040.000,00        |
|           | - Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)          | 80.640.000,00         | -                     |
| <b>12</b> | <b>Honorarium PNS</b>                              | <b>115.252.000,00</b> | <b>460.229.500,00</b> |
|           | - Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan      | -                     | -                     |
|           | - Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa   | -                     | 3.600.000,00          |
|           | - Beban Honorarium PA dan KPA                      | 14.200.000,00         | 15.000.000,00         |
|           | - Beban Honorarium PPK OPD                         | 11.200.000,00         | 7.800.000,00          |
|           | - Beban Honorarium PPTK OPD dan Pembantu PPTK      | 65.052.000,00         | 72.800.000,00         |
|           | - Beban Honorarium Bendahara dan Pembantu Bend.    | 24.800.000,00         | 27.600.000,00         |
|           | - Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang        | -                     | -                     |
|           | - Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan           | -                     | 54.918.000,00         |

|   |                           |   |                |
|---|---------------------------|---|----------------|
| - | Beban Belanja Sosialisasi | - | 278.511.500,00 |
|---|---------------------------|---|----------------|

|                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | <b>2020</b>          | <b>2019</b>          |
| <b>9.1.2.18.BEBAN PEMELIHARAAN</b> | <b>17.260.000,00</b> | <b>15.965.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasibeban pemeliharaan dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019.

Rincian beban pemeliharaan terinci sebagai berikut :

| 9.1.2.18 | <b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>                                       | <b>17.260.000,00</b> | <b>15.965.000,00</b> |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1        | Beban Belanja Pemeliharaan gedung/Ruangan/Dinding –LO           | -                    | 970.000,00           |
| 2        | Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor-LO | -                    | 13.030.000,00        |
| 3        | Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Kerja Lapangan                 | 5.200.000,00         | 1.965.000,00         |
| 4        | Beban Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan         | 12.060.000,00        | -                    |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>9.1.2.15. BEBAN PERJALANAN DINAS</b> | <b>2020</b>           | <b>2019</b>           |
|   | <b>242.789.086,00</b> | <b>692.568.184,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Perjalanan Dinas Pada Tahun 2020 dan 2019.

Rincian beban perjalanan dinas terinci sebagai berikut :

| 9.1.2.15 | <b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>                   | <b>242.789.086,00</b> | <b>692.568.184,00</b> |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah –LO | 32.845.000,00         | 32.845.000,00,00      |
| 2        | Beban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah –LO  | 209.944.086,00        | 597.218.184,00        |

#### 9.1.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

|  | 2020           | 2019           |
|--|----------------|----------------|
|  | 530.718.091,17 | 398.082.830,57 |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Penyusutan dan amortisasi Pada Tahun 2020 sebesar Rp.530.718.091,17 dan 2019 sebesar Rp. 398.082.830,57

#### 5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

|                      | 2020                    | 2019                    |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ekuitas Awal:</b> | <b>1.235.434.386,50</b> | <b>1.189.026.101,07</b> |

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.235.434.386,50 yang terdiri dari:

|                       |                     |                         |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                     | Jumlah Aset Lancar  | 6.023.000,00            |
| 2                     | Jumlah Aset Tetap   | 1.230.937547,50         |
| 3                     | Jumlah Aset Lainnya | -                       |
| <b>Jumlah Aset</b>    |                     | <b>1.236.960.547,50</b> |
|                       | Jumlah Kewajiban    | 1.526.161,00            |
| <b>Jumlah Ekuitas</b> |                     | <b>1.235.434.386,50</b> |

|                           | 2020                      | 2019                      |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Surplus/Defisit-LO</b> | <b>(4.418.841.877,17)</b> | <b>(5.826.608.328,57)</b> |

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (4.418.841.877,17) dan pada tahun 2019 sebesar (5.826.608.328,57)

|                 | 2020                    | 2019                    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>R/K PPKD</b> | <b>4.182.623.567,00</b> | <b>5.869.316.614,00</b> |

R/K PPKD merupakan jumlah SP2D yang di cairkan selama tahun anggaran 2020 dan 2019 di BPBD dikurang dengan CP Belanja.

**Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar**

Koreksi Mutasi Persediaan (tedmon) dari BTT  
Mutasi Kurang Aset Tetap

-  
-  
-

|                      | 2020                    | 2019                    |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ekuitas Akhir</b> | <b>1.278.902.036,33</b> | <b>1.235.434.386,50</b> |

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.278.902.036,33 yang terdiri dari:

|                       |                     |                         |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                     | Jumlah Aset Lancar  | 156.268.120,00          |
| 2                     | Jumlah Aset Tetap   | 1.124.288.416,33        |
| 3                     | Jumlah Aset Lainnya | -                       |
| <b>Jumlah Aset</b>    |                     | <b>1.280.556.536,33</b> |
|                       | Jumlah Kewajiban    | 1.654.500,00            |
| <b>Jumlah Ekuitas</b> |                     | <b>1.278.902.036,33</b> |

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN**

**1. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Peanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota.

**2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menerapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkann penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatn dan belanja daerah; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
BPBD mempunyai fungsi :
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

## 5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
  1. Seksi Pencegahan;
  2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
  1. Seksi Kedaruratan;
  2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
  1. Seksi Rehabilitasi;
  2. Seksi Rekonstruksi.

## 6. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Aspek strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang baru berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2020 sebanyak 31 orang.
4. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2020 sebanyak 4 orang.
5. Jumlah Tenaga Harian Lepas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2020 sebanyak 27 orang.

## 6. HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kendala yang menyebabkan beberapa Kegiatan di tahun Anggaran 2020 terealisasi di bawah 80 %, diantaranya :

| Uraian   | Anggaran   | Realisasi  | %     |
|--|------------|------------|-------|
| • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |            |            |       |
| ➢ Belanja Telepon  | 4.200.000  | 2.751.848  | 65,52 |
| ➢ Belanja Surat Kabar/ Majalah   | 13.200.000 | 7.420.000  | 56,21 |
| • Penyediaan Belanja Pegawai   |            |            |       |
| ➢ Belanja Jasa Iuran Jaminan Kesehatan /BPJS Kesehatan                 | 50.000.000 | 32.988.184 | 75,34 |
| ➢ Belanja Jasa Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN | 33.054.294 | 18.038.601 | 54,57 |
| • Penyediaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional               |            |            |       |
| ➢ Belanja Jasa Service   | 20.280.000 | 13.607.000 | 67,10 |
| • Penyediaan Belanja Cetak dan Penggadaan                              |            |            |       |
| ➢ Belanja Penggadaan   | 11.460.000 | 8.907.200  | 77,72 |
| • Penyediaan Makanan dan Minuman                                       |            |            |       |
| ➢ Belanja Makanan dan Minuman Tamu                                     | 6.000.000  | 1.774.900  | 29,58 |
| • Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas                                  |            |            |       |
| ➢ Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah                                | 41.922.000 | 32.845.000 | 78,35 |
| • Penyediaan Belanja Pemeliharaan                                      |            |            |       |
| ➢ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | 7.395.000  | 4.950.000  | 66,94 |

Pada umumnya kendala yang dihadapi adalah batalnya beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tahun Anggaran 2020, adanya pengurangan jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL), kesalahan penempatan mata anggaran di APBD 2020 awal serta tidak adanya Perubahan APBD 2020 yang menyebabkan tidak bisanya anggaran tersebut dipindahkan ke kegiatan lain, namun dengan adanya pergeseran anggaran dan dukungan bersama struktur yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan total realisasi 96,75 % .

## BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

| NO         | Uraian                              | Anggaran                  | Realisasi 2020            | Realisasi 2019            | %            |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                      | <b>4.309.803.855,00</b>   | <b>4.169.685.447,00</b>   | <b>5.869.316.614,00</b>   | <b>96,75</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>              | <b>4265.080.855,00</b>    | <b>4.124.965.447,00</b>   | <b>5.455.063.337,00</b>   | <b>96,71</b> |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai                     | 2.913.518.366,00          | 2.850.041.312,00          | 2.810.196.383,00          | 97,82        |
| 5.1.2      | Belanja Barang                      | 1.351.562.489,00          | 1.274.924.135,00          | 2.644.866.955,00          | 94,33        |
|            | <b>Jumlah Belanja Operasi</b>       | <b>4.265.080.855,00</b>   | <b>4.124.965.447,00</b>   | <b>5.455.063.337,00</b>   | <b>96,71</b> |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>44.723.000,00</b>      | <b>44.720.000,00</b>      | <b>414.253.277,00</b>     | <b>99,99</b> |
| 5.2.2      | Belanja Peralatan dan Mesin         | 44.723.000,00             | 44.720.000,00             | 211.932.727,00            | 99,99        |
| 5.2.3      | Belanja Gedung dan Bangunan         | -                         | -                         | -                         | -            |
| 5.2.4      | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | -                         | -                         | 202.320.550,00            | -            |
| 5.2.5      | Belanja Aset Tetap Lainnya          | -                         | -                         | -                         | -            |
|            | <b>Jumlah Belanja Modal</b>         | <b>44.723.000,00</b>      | <b>44.720.000,00</b>      | <b>414.253.277,00</b>     | <b>99,99</b> |
|            | <b>JUMLAH BELANJA</b>               | <b>4.309.803.855,00</b>   | <b>4.169.685.447,00</b>   | <b>5.869.316.614,00</b>   | <b>96,75</b> |
|            | <b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>           | <b>(4.309.803.855,00)</b> | <b>(4.169.685.447,00)</b> | <b>(5.869.316.614,00)</b> | <b>96,75</b> |

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai

target indikator kerja yang direncanakan. Keterlamabatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Payakumbuh, Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**H. JONI AMIR, S. Sos**

NIP. 19650619 199003 1 003